

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan keputusan menteri agama Republik Indonesia No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat, telah memberikan tugas dan wewenang kepada lembaga zakat yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan dan pemberdayaan, untuk melaksanakan kegiatan pendayagunaan dana zakat yang bersifat sosial dan program pendayagunaan berbasis pengembangan ekonomi. Tugas dan wewenang ini telah membuka ruang bagi lembaga zakat untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat.¹ Menurut hasil analisis Salahuddin (2005) tentang zakat secara sosiologis menggambarkan tujuan pemberian zakat yaitu “tidak hanya untuk memberikan zakat pada mustahik melalui bantuan langsung yang bersifat amal (*charity*), tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan memandirikan, menumbuhkan, dan menguatkan kelembagaan yang menyokong taraf hidup mustahik (penerima zakat) kedalam kehidupan yang lebih sejahtera”.² Untuk itu, keberadaan lembaga zakat sebagai lembaga *filantropi sosial* umat muslim ditujukan untuk mengatasi

¹ Undang-undang No.38 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat

² Muhamad Solahuddin, Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kabupaten Bima), Thesis, Bidang Keilmuan Syariah, Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM) IAIN Mataram, 2005.

kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat muslim dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat yang dapat membantu mengembalikan peningkatan kapasitas sosial masyarakat miskin (*dhuafa*) dengan didasari nilai-nilai keislaman.

Besarnya potensi dana yang dimiliki lembaga zakat di Banten tentu perlu dibarengi dengan kinerja lembaga zakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana fungsinya, yang dapat di ukur melalui besarnya kontribusi yang telah diberikan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat terhadap delapan kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima zakat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, lembaga zakat saat ini mulai mengarahkan pola penyaluran dana zakat produktif pada program-program yang bersifat pemberdayaan mustahik. Mustahik (penerima zakat), tidak selalu mampu memperbaiki keadaan perekonomiannya yang menyokong kehidupannya hanya dengan bantuan pemberian modal dalam bentuk uang. Diperlukan strategi penyaluran zakat yang dapat memandirikan mustahik, dengan adanya program pemberdayaan mustahik diharapkan dapat mengubah status mustahik, dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (*mustahik move to muzakki*).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka lembaga zakat di Banten sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan yang lahir dari keswadayaan masyarakat harus diperkuat agar lembaga tersebut memiliki daya saing dengan

dukungan ekonomi masyarakat lokal. Pada saat yang sama masyarakat digerakkan untuk menunaikan kewajiban berzakat melalui lembaga zakat, disisi lain lembaga zakat juga berperan dalam memberikan hak-hak zakat pada delapan golongan *asnaf* dengan upaya-upaya pemberdayaan dan kemandirian. Pemberdayaan didefinisikan oleh Jim Ife (1995: 182) sebagai “... *providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in an affect the life of their community*”.³ Untuk itu fokus pemberdayaan terletak pada upaya-upaya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan masyarakatnya, serta menjadi pendorong kemandirian dan pemerataan kesejahteraan.

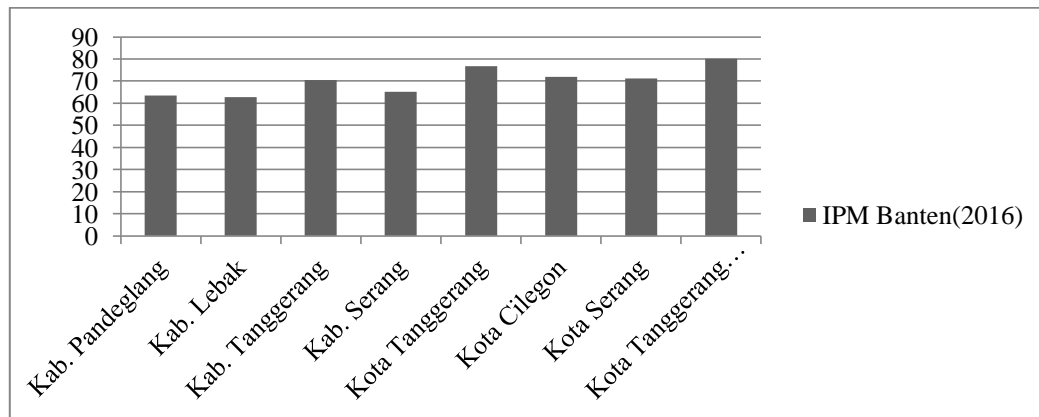
Hasil yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Banten sepanjang tahun 2016 tercatat jumlah penduduk miskin di Banten sebesar 649.188 jiwa. Dengan jumlah penduduk provinsi Banten tahun 2016 sebesar 12.203.148 juta jiwa, maka sekitar 5,51 % dari total penduduk di Banten masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, hasil Indeks Pembangunan Manusia (*Human Index Development*) yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja penduduk di provinsi Banten pada tahun 2016

³ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development Community Based Alternatives in an Age Globalisation* (Australia: Pearson Education Australia Aquatic Drive Frenchs Forest NSW, 2006), p.345.

menunjukkan angka sebesar 70,96. Meskipun (*Human Development Index*) provinsi Banten setiap tahun mengalami peningkatan, namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten mengalami kenaikan menjadi 9,28 persen, yang artinya sekitar 1.132.452 juta jiwa penduduk di Banten tidak memiliki pekerjaan, angka pengangguran yang masih terbilang cukup tinggi.⁴ Angka pengangguran ini terutama di dominasi oleh penduduk-penduduk yang tinggal pada daerah-daerah terpencil di Banten yang memiliki akses cukup jauh dengan kota/ibu kota, seperti daerah pedesaan dan pesisir di tingkat kabupaten, berikut ini **Gambar 1.1** menunjukkan wilayah dengan indeks pembangunan manusia dan **Gambar 1.2** menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten.⁵

Gambar 1.1

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2016

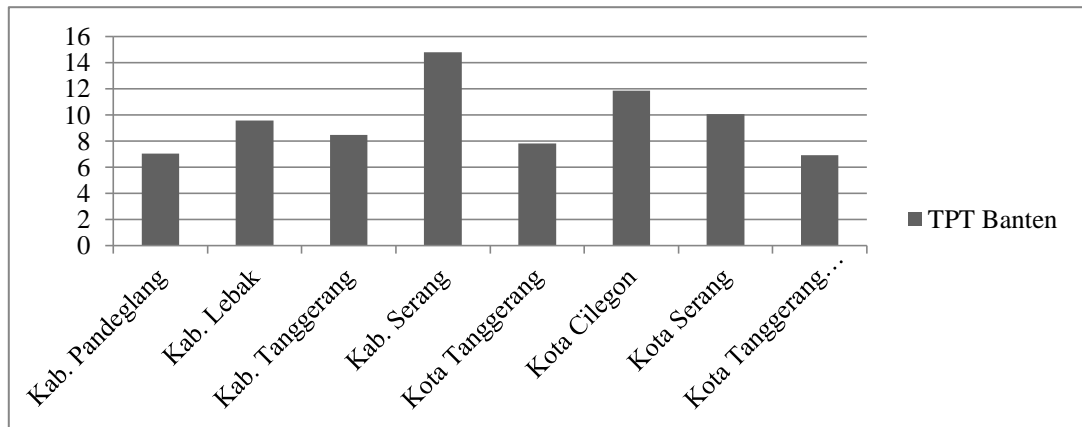


⁴ BPS Provinsi Banten tahun 2016 (di akses pada 11 maret 2018) .

⁵ BPS Provinsi Banten Tahun 2016 (diakses pada 05 maret 2018)

Gambar 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten 2016



Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia tidak diikuti dengan data penurunan angka pengangguran di Banten, yang menjadi prasyarat tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Permasalahan tersebut tentu menjadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga zakat untuk bekerjasama membangun masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan agar mampu memperbaiki kualitas taraf hidupnya dengan melihat masalah di wilayah tempat tinggalnya sebagai peluang untuk membentuk sebuah model usaha baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar.

Program pemberdayaan nelayan kerag hijau di Kelurahan Margaluyu, Kampung Rujak Beling, Kasemen, yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Banten misalnya, program ini merupakan salah satu contoh upaya pemberdayaan melalui dana zakat produktif yang bermaksud memberikan akses bagi masyarakat pesisir meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dengan melihat potensi wilayah yang

dimiliki sebagai peluang untuk membentuk model usaha baru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar sekaligus juga membentuk lembaga lokal seperti koperasi yang dapat mengkoordinir kebutuhan para anggota nelayan kerang hijau .

Anwar dan Haryadi (2004) menjelaskan bahwa sebuah program pemberdayaan masyarakat disamping berdasarkan kebutuhan sasaran juga harus mempertimbangkan skala prioritas (mana yang lebih mendesak dan memberikan *Multiflier Effect* terhadap penguatan ekonomi lokal).⁶ Dengan demikian upaya menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki keuntungan ganda. Pada satu sisi, kemandirian perekonomian masyarakat melalui program akan membantu menambah penghimpunan zakat pada (LAZ) karna penerima manfaat berubah status menjadi pemberi manfaat. Disisi lain, kemandirian perekonomian masyarakat akan memberi dampak pada pengembangan masyarakat disekitarnya.

Dengan demikian kajian tentang program pemberdayaan nelayan kerang hijau yang dilakukan Dompot Dhuafa Banten di Kelurahan Margaluyu, Kampung Rujak Beling, Kasemen. Melalui pendayagunaan zakat produktif diangkat menjadi fokus kajian karena aspek ini tergolong strategis dalam mendukung tugas LAZ sebagaimana amanah UU. No.38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

⁶ Anwar W dan Haryadi, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: TKP3 KPK Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan, 2004), p.10.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan diatas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi nelayan kerang hijau sebelum adanya program pemberdayaan?
2. Bagaimana implementasi program pemberdayaan nelayan kerang hijau yang dilakukan Dompot Dhuafa Banten?
3. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di Kelurahan Margaluyu tempat program berlangsung?
4. Manfaat apa yang didapat komunitas Nelayan Kerang Hijau dari program pemberdayaan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi kehidupan masyarakat sebelum adanya bantuan program pemberdayaan dari Dompot Dhuafa Banten.
2. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam program pemberdayaan nelayan kerang hijau.
3. Untuk mengetahui implementasi program yang dilakukan Dompot Dhuafa Banten terhadap komunitas nelayan kerang hijau di Kelurahan Margaluyu, Kampung Rujak Beling, Kasemen.
4. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan komunitas Nelayan Kerang Hijau melalui program pemberdayaan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengembangan masyarakat islam. Terutama terkait dengan pendayagunaan zakat produktif melalui program pengembangan masyarakat lokal.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti : penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif pada kehidupan masyarakat.
2. Bagi masyarakat : diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat khususnya zakat produktif mengingat kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan zakat produktif.
3. Bagi akademis : hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat.
4. Bagi pemerintah : dengan hasil penelitian ini semoga dapat membantu memberikan informasi mengenai pendayagunaan zakat produktif sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife, *empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community.* (pemberdayaan artinya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri, dan berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan dari masyarakatnya).

Dunham mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela. Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged people*) atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka (*personal choices and life*); kesempatan (*chances*); definisi kebutuhan (*need definition*); gagasan (*ideas*); institusi (*institutions*); sumber-sumber daya (*resources*); aktivitas ekonomi (*economic activity*), dan reproduksi (*reproduction*) dengan melakukan intervensi melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*); aksi politik dan sosial (*social and political action*); serta pendidikan (*education*). World Bank mengartikan pemberdayaan

sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.⁷

Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka berdasarkan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya hingga mencapai taraf hidup yang lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Peran yang dimainkan oleh

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta,2017), pp.28-29.

⁸ Mardikanto dan Sri Utami, *Redefinisi Dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* (Solo:Prima Theresia Pressindo,2003), p.68.

pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan) agar masyarakat semakin mandiri, karna itu pemberdayaan masyarakat haruslah dipandang sebagai sebuah proses menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai upaya penguatan kapasitas, yaitu penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok atau organisasi sosial untuk dapat memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti yang luas dan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan *intervensi sosial* (perubahan terencana) lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintahan sebagai dukungan (*support*) dalam proses perencanaan pengembangan program.

1. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Perubahan Sosial

SDC Menyatakan bahwa pemberdayaan tidak sekedar proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi juga merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.

Sejalan dengan pemahaman tentang pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan sosial yang dikemukakan di atas, pemberdayaan juga sering disebut proses rekayasa sosial atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu

melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing.⁹

2. Pemberdayaan Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat

Subejo dan Narino mengemukakan bahwa, terminology pemberdayaan masyarakat kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatann masyarakat dan pembangunan masyarakat (*Community Development*), yaitu proses dimana usaha-usaha orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat kedalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat untuk menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional.¹⁰

Cook menggarisbawahi bahwa pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan. Sedangkan Giarci memandang *Community Development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan, dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini memfasilitasi penguatan ekonomi lokal dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan *Collective Action* dan

⁹ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2007), p. 25.

¹⁰ Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), p.86.

melakukan *political pressure* serta membawa usaha-usaha bersama untuk membawa perubahan-perubahan ditingkat lokal.¹¹

Bartle mendefinisikan Community Development sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Pembangunan masyarakat merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power-nya* meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.¹²

Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*). Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat utama yang diibaratkan sebagai sebuah gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis.¹³

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal diantaranya mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk

¹¹ Suzanna Eddyono, *Tantangan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Azzagrafika, 2015), p.22.

¹² Eka Zuni Lusi A, *Merajut Kesejahteraan di Aras Lokal*, (Yogyakarta: Azzagrafika, 2015), p.33.

¹³ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*, (Pearson Education Australia, 2006), p.120.

memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.¹⁴

Masyarakat umumnya memiliki institusi lokal baik yang dibentuk oleh pemerintah lokal maupun tumbuh alami berdasarkan kesepakatan masyarakat sendiri yang sebenarnya dapat dikaitkan dengan usaha-usaha kerjasama produktif.

Subejo dan Iwamoto (2003) mendefinisikan bahwa beberapa institusi lokal-tradisional terkait dengan ekonomi atau pasar yang sebenarnya sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya (*self-organizing*).¹⁵

3. Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut bahasa, "Pemberdayaan" berasal dari kata "Daya" yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. seperti pemberdayaan individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.¹⁶

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran dari berbagai aspek peningkatan

¹⁴ Suzanna Eddyono, *Tantangan Pemberdayaan*, ..., pp.40-41

¹⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, ..., p.128.

¹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, (Bandung:PT Refika Aditama,2014),p.38

keberdayaan individu, kelompok atau masyarakat, termasuk juga pemberdayaan pada sektor ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Menurut *Asian Development Bank* (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik: (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) bersifat holistik; (5) berkelanjutan.

1. Model Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat itu sendiri, dengan difasilitasi oleh pekerja sosial.

Pengembangan masyarakat lokal merupakan perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal (*return to local resource*) dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada “tujuan proses” daripada hasil, proses yang dimaksud adalah berupa timbulnya pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, relasi, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap program

pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal.¹⁷

Tabel, 1.1.

Gambaran pengembangan masyarakat lokal

Parameter	Pengembangan Masyarakat Lokal
Orientasi tujuan	Kemandirian, integrasi, dan kemampuan masyarakat (tujuan proses)
Penerima manfaat	Masyarakat secara keseluruhan
Peranan masyarakat	Partisipasi dalam proses pemecahan masalah
Media perubahan	Mobilisasi kelompok-kelompok kecil
Strategi perubahan	Pelibatan masyarakat dalam pemecahan masalah
Teknik perubahan	konsensus dan diskusi kelompok, partisipasi, <i>role model</i> , <i>brain storming</i> , bimbingan dan penyuluhan.

Dengan demikian, dilihat dari kepentingan masyarakat lokal pengembangan masyarakat paling tidak akan memberikan manfaat berupa: (1) Mempercepat proses perubahan dan pembaruan pada tingkat komunitas lokal; (2) Mendorong integrasi masyarakat lokal melalui kontribusi timbal balik antara masyarakat lokal dan nasional; (3) Memberikan iklim yang kondusif bagi masyarakat pada tingkat komunitas untuk menciptakan,

¹⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), p.26.

mengembangkan, dan memanfaatkan peluang bagi peningkatan taraf hidupnya.¹⁸

2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan pemberdayaan masyarakat yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan kemanusiaan (*Human Service Organizations*), mencakup beberapa tahapan dibawah ini, yaitu:

1. Tahap persiapan.

- a. persiapan petugas (tenaga pemberdayaan masyarakat), penyiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan (*pre-intervensi*), mengenai pendekatan dan teknik-teknik apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
- b. Persiapan lapangan, melakukan studi kelayakan, perizinan, menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal atau mengadakan kegiatan dengan melibatkan unsur-unsur warga (remaja, pemuda) terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran program.

2. Tahap Assessment.

Proses assessment yang dilakukan adalah proses mengidentifikasi masalah klien penerima manfaat program.

¹⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), p.40.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Pada tahap ini, pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir masalah yang mereka hadapi, dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan alternative program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

4. Tahap Rencana Aksi

Pada tahap ini, pelaku perubahan membantu komunitas sasaran untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya.

5. Tahap Pelaksanaan Program

Dalam upaya melaksanakan program pengembangan masyarakat. Peran masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

6. Tahap Evaluasi Proses

Tahap evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga, diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.¹⁹

¹⁹ Rukminto, Adi, *Intervensi Komunitas, ...*, pp.25-27

3. Prinsip Program Pemberdayaan

1. Orientasi kebutuhan, artinya pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries group*). Penerapan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan dalam bentuk seragam pada setiap lokasi, namun lebih pada penggalian pemberdayaan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing komunitas, sehingga muncul beragam bentuk pemberdayaan yang mencerminkan karakter masyarakat setempat.
2. Pengembangan sumberdaya lokal, artinya pemberdayaan didasarkan atas pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam lokal secara berkelanjutan. Diimbangi dengan kapasitas sumberdaya manusia (*capacity building*).
3. Partisipasi, program harus melibatkan setiap orang didalam komunitas untuk berperan serta dalam proses dan kegiatan komunitas. Peran serta yang dilandasi kesadaran dan kesukarelaan serta keyakinan akan perubahan kearah kebaikan, menjadi kunci masyarakat untuk melanjutkan serta memelihara hasil dari program.
4. Transparansi, pengelolaan dan penggunaan dana bergulir harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.

5. Akuntabilitas, pengelolaan dan penggunaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten.
6. Keberlanjutan, pengembangan komunitas dilakukan berbasis pertimbangan keberlanjutan. Selain itu, program harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.
7. Membangun komunitas/*community building*, penguatan interaksi sosial di dalam komunitas, membangun kebersamaan menuju terlaksananya kegiatan-kegiatan dan tujuan bersama.
8. Keterpaduan proses, proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus sesuai dengan hasil yang diharapkan.
9. Sistematis dan terorganisir, sistematis berarti melalui cara yang bertahap, sedangkan terorganisir berarti melalui cara berkelompok dan menumbuhkan kelembagaan yang mandiri.²⁰

Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari bahasa arab kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci,berkah,tumbuh,dan terpuji. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat berarti sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada

²⁰ Suharto, *Pengembangan Masyarakat, ...*, pp.28-30

yang berhak menerimanya.²¹ Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan masyarakat yang tidak mampu (miskin).

2. Pengertian Lembaga Zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Secara konsep tugas-tugas amil zakat adalah : *pertama*, melakukan pendataan *muzzaki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan *muzzaki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administrasi dan manajerial dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi atau pendayagunaan serta melakukan pembinaan berlanjut pada penerima zakat.²²

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani,1998), p.10.

²² Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian ...*, p.20.

3. Fungsi Lembaga Zakat

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

a. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan asas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, asas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus di bangun.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, merupakan upaya untuk mencapai misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin dan masyarakat mustahik tidak selamanya bergantung dengan pemberian, bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.

4. Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan keputusan menteri agama Republik Indonesia No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat disebutkan bahwa kegiatan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu program

pendayagunaan yang bersifat sosial dan program pendayagunaan berbasis pengembangan ekonomi.

Pendayagunaan zakat yang berbasis sosial adalah penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif sering disebut program santunan. Pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (*mustahik*), penyaluran dana zakat ini diarahkan kepada usaha ekonomi yang produktif. Sehingga hasilnya diharapkan dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.²³

Masing-masing kebutuhan konsumtif tersebut, kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

1. Konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang yang semula uang, diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

²³ Rusli, H. Abubaka, S. Sofyan, *Analisis Pemberian Dampak Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*. (Skripsi). 2013. UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.

3. Produktif tradisional, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk bantuan ini akan dapat menciptakan suatu usaha bagi fakir miskin.
4. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang.

5. Dana Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan itu zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi di kembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata karna kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karna kemiskinan tidak mungkin dapat berubah kecuali di mulai dari perubahan mental orang miskin itu sendiri, inilah peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada tataran pengembangan usaha.

Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai *stimulant* atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program

pemberdayaan harus lebih diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.

6. Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Qadir (2001) menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.²⁴

Dalam pendayagunaan zakat untuk aktivitas-aktivitas yang produktif memiliki beberapa prosedur.²⁵ Sebagaimana terdapat dalam UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab V pasal 29 sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi
6. Membuat laporan

²⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), p.5.

²⁵ Naimah, "Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Peningkatan Perekonomian Ummat", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari*, Vol.30, N0.3 (januari, 2001), p.15.

7. Kriteria Penerima Dana Zakat Produktif

Seluruh perputaran dana Zakat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial dan termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima dana zakat sebagaimana dalam al-quran surah At-Taubah ayat 60 :²⁶

Artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*(At- Taubah:60)

Kriteria Kelompok Sasaran

A. Dari segi pendapatan dan kepemilikan

- 1) Kepala keluarga yang memiliki penghasilan dari usaha utama per hari kurang dari sama dengan Rp 20.000,- untuk daerah pedesaan atau menyesuaikan dengan UMR daerah sasaran.
- 2) Kepala keluarga yang mempunyai penghasilan per hari kurang dari sama dengan Rp 30.000,- untuk daerah pinggiran kota dan perkotaan menyesuaikan dengan UMR daerah sasaran.
- 3) Kondisi rumah (milik sendiri/sewa/kontrak) kurang layak dan kepemilikan harta (peralatan hidup) terbatas. Diseskripsikan dengan

²⁶ M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), p.273.

indeks rumah. Selain itu ada penilaian (kesepakatan) dari masyarakat setempat bahwa yang bersangkutan termasuk miskin.

B. Dari segi potensi usaha

1) Potensi pengembangan, artinya usaha tersebut mampu untuk ditingkatkan baik skala maupun ruang lingkungannya.

- Ketersediaan bahan baku
- Kapasitas produksi
- Potensi pasar
- Daya serap tenaga kerja

2) Potensi pemberdayaan untuk menciptakan usaha turunan, artinya dalam pengembangan usaha tersebut akan dimungkinkan untuk memberikan lapangan pekerjaan atau manfaat ekonomi bagi mustahik lainnya.

C. Dari segi potensi sumber daya manusia (SDM)

- Usaha produktif minimal 18 tahun atau telah menikah dan maksimal 60 tahun
- Mempunyai visi untuk pengembangan usahanya
- Mampu bekerja

Kriteria Wilayah Sasaran

A. Wilayah Urban

- Daerah kumuh dan padat penduduk

- Mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai sentra produksi
- Kemudahan dalam akses transportasi dan pemasaran
- Tidak sedang menjalankan program yang sejenis dengan pihak lain

B. Wilayah Rural

- Mempunyai potensi komoditas unggulan yang komparatif
- Memiliki potensi sumber daya alam dimana kelompok miskin mempunyai aksesibilitas dalam pengelolaan sumber daya tersebut
- Memiliki potensi SDM yang mendukung
- Tidak termasuk dalam daerah konflik atau daerah yang memiliki potensi konflik yang tinggi.

Pemberian zakat kepada para mustahik zakat, baik secara konsumtif atau produktif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi para mustahik zakat, amil zakat perlu memastikan kelayakan mereka. apakah mereka dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat atau tidak, dan dia dimasukkan dalam mustahik yang konsumtif atau produktif. Ini memerlukan analisis tersendiri bagi para ‘amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan fungsi zakat dapat berjalan dengan baik.²⁷

²⁷ Panduan Program Umum dan Teknis Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa, p.7.

F. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran data yang peneliti lakukan, peneliti menemukan ada beberapa skripsi yang membahas tentang zakat produktif yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu:

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Saifullah (Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun, 2012).	Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang).	Mengetahui sistem pengelolaan zakat melalui pemberdayaan masyarakat di LAZ Rumah Zakat Kota Semarang. Mengetahui jenis pemberdayaan masyarakat yang	Analisis Deskriptif Kualitatif	Sistem pengelolaan zakat di LAZ rumah zakat kota Semarang adalah konsumtif (tradisional kreatif). Permasalahan yang dialami adalah: 1. Jenis pemberdayaan

			dilakukan Rumah Zakat Kota Semarang.		selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif 2. Jenis pemberdayaan zakat produktif masih sebatas pemberian modal usaha.
2.	Muslih Adi Saputra (Thesis IAIN Surakarta, Tahun 2017)	Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Yayasan Solo Peduli)	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap pemberdayaan	Analisi Deskriptif Kualitatif	Dana zakat produktif mampu mempengaruhi perekonomian mustahik melalui pemberian bantuan usaha baru kepada mustahik. Jenis

			dan pendapatan mustahik melalui dana zakat yang diberikan Yayasan Solo Peduli.		usaha juga ditentukan oleh Yayasan Solo Peduli disesuaikan dengan keinginan dari mustahik.
3.	Siti Lestari (Skripsi, UIN Walisongo, Tahun 2015)	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kendal)	Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektifitas dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten	Deskriptif Induktif	Pengelolaan zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua yaitu bantuan pemberian fasilitas usaha dan pemberian bantuan modal usaha. Faktor

			Kendal.		penghambat yang dihadapi adalah mustahik penerima bantuan permodalan tidak bisa menggunakan bantuan dana dengan baik untuk pengembangan usaha.
4.	Fajriansyah (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun, 2013)	Implementasi Pelatihan Keterampilan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Kasus	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini membuktikan konsep, strategi, dan tahapan dalam pemberdayaan

		<p>Pelatihan Keterampilan di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Kota Tangerang</p>	<p>masyarakat melalui pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh Institut Kemandirian Dompot Dhuafa di Kota Tangerang dengan mengetahui seperti apa pelaksanaan pelatihan tersebut dengan</p>		<p>masyarakat di level Mezzo (pemberdayaan terhadap sekelompok klien).</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------

			melihat teori tentang strategi dan tahapan dalam pemberdayaan masyarakat.		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Terdapat kesamaan Topik dalam keempat penelitian diatas yaitu mengenai pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan masyarakat. Studi kasus penelitian yang disasar rata-rata adalah penerima dana zakat (mustahik) produktif dengan mengkaji dan menganalisis pengaruh bantuan program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dua diantara empat penelitian membahas mengenai program pemberdayaan melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, sedangkan dua lainnya membahas mengenai zakat produktif dan metode pendampingan program seperti memberikan pelatihan kerja, penguatan kapabilitas kelompok/komunitas,dan membantu memperluas jaringan mitra usaha sebagai upaya mengurangi kemiskinan di masyarakat.

Dari beberapa penelitian diatas penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas pendayagunaan dana zakat produktif melalui program pemberdayaan masyarakat dengan model pengembangan masyarakat lokal seperti yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa Banten.

G. Metode Penelitian

Keseluruhan pembahasan penelitian akan disajikan berupa deskripsi yang memberikan gambaran dan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan dan manfaat program pemberdayaan ekonomi berbasis pendayagunaan dana zakat produktif, dalam hal ini Program *Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau Dompot Dhuafa Banten* bagi masyarakat di Kelurahan Margaluyu. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang akan dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara kelompok, dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Bahasa yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah interpretasi. Peneliti akan mendiskusikan kasus dalam sebuah konteks sosial dan mengembangkan *grounded theories* yang menegaskan proses dan rangkaian suatu kejadian dalam setting yang spesifik.

Data kualitatif bersifat empiris yang meliputi pendokumentasian kejadian nyata, merekam apa yang orang bicarakan (dengan kata, gestur tubuh, dan nada bicara), mengamati sikap spesifik, mempelajari dokumen tertulis, atau menguji gambaran visual. Teori akan berkembang seiring dengan proses koleksi data. Peneliti data kualitatif menginterpretasikan data dengan memberi arti, menerjemahkannya, atau membuat sesuatu yang mudah dimengerti.²⁸

²⁸ Laurence W Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches Fourth Edition*, (Boston : Pearson Education Company, 2000), p.130.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Margaluyu Kampung Rujak Beling, Kasemen. Untuk tujuan memperoleh data sedalam dan sejelas-jelasnya pada program pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Banten.

2. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif menyajikan gambaran spesifik dan detail dari sebuah situasi, seting sosial, atau suatu hubungan. Pada penelitian deskriptif, peneliti mulai dengan subjek yang terdefiniskan dengan baik dan membawa penelitian untuk mendeskripsikannya secara akurat.²⁹

Luaran dari studi deskriptif adalah gambaran detail dari subjek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan suatu gambaran tentang pelaksanaan program pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau oleh lembaga amil zakat Dompot Dhuafa di Margaluyu, maka jenis penelitian yang tepat untuk tujuan ini adalah penelitian deskriptif. Dalam hal ini, kasus yang akan diamati adalah bagaimana proses pelaksanaan program *Pemberdayaan masyarakat Nelayan Kerang Hijau* berlangsung, model pemberdayaan masyarakat apa yang diterapkan, dan manfaat program dilihat dari sudut pandang pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sebagai penyelenggara program dan masyarakat komunitas Nelayan sebagai sasaran program.

²⁹ Neuman, *Social Research Methods* ..., p.150.

Sesuai dengan namanya, desain deskriptif bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Tujuan dari desain ini hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti berharap mampu untuk mendapatkan gambaran mengenai program pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau melalui pendayagunaan dana zakat produktif Dompot Dhuafa dan manfaatnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi pengumpulan informasi untuk penelitian melalui berbagai sumber data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah, observasi, dan wawancara mendalam.

a. Pengamatan atau Observasi

Metode pengamatan atau observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.³⁰ Peneliti melakukan pengamatan pada

³⁰ John W.Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, (Thousand Oaks: Sage Publication, Inc, 2014), p.38.

program pemberdayaan masyarakat Nelayan Kerang Hijau di Margaluyu untuk melihat bagaimana program terimplementasi, bagaimana manfaat program pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau terhadap kehidupan masyarakat, dan bagaimana respon masyarakat saat program pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan Ketua Divisi Program Dompot Dhuafa Banten dan pendamping program pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau. Wawancara dilakukan secara informal, namun tetap dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat.

Wawancara kelompok adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang bergantung pertanyaan sistematis terhadap beberapa individu secara serentak dalam setting formal maupun informal. Dalam beberapa wawancara kelompok, moderator mengarahkan pertanyaan dan interaksi antar responden dalam mode terstruktur maupun tidak terstruktur, tergantung pada tujuan dari wawancara. Wawancara kelompok juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau pengalaman yang

³¹ Creswell, *Research Design: Qualitative ...*, p.40.

dimiliki oleh anggota kelompok.³² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kelompok yang melibatkan 8 (delapan) informan anggota komunitas nelayan kerang hijau. Karena informan yang dipilih adalah komunitas nelayan kerang hijau, maka wawancara kelompok dilakukan secara informal sehingga dapat menciptakan suasana yang cair dan terbuka.

1. Pemilihan Informan/Narasumber

Informan penelitian terdiri atas elemen yang terlibat dalam program Pemberdayaan ekonomi nelayan kerang hijau, yaitu elemen pemberi dan penerima manfaat. Secara umum terdapat dua elemen penting yang akan menjadi informan dalam penelitian : elemen Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dan elemen komunitas nelayan kerang hijau. Elemen Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Banten yang akan dimintai informasi adalah ketua divisi program, pendamping program pemberdayaan ekonomi nelayan kerang hijau di Kasemen. Ketua divisi program Dompot Dhuafa Banten sebagai pemegang keputusan tertinggi sudah selayaknya memahami filosofi dan urgensi dibentuknya Program Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau untuk komunitas nelayan di Margaluyu sebagai sarana memberdayakan dan memandirikan masyarakat atau komunitas nelayan miskin melalui pendayagunaan dana zakat produktif.

Pendamping program pemberdayaan nelayan kerang hijau juga dimintai keterangannya mengenai konten dari program serta apa saja

³² Creswell, *Research Design: Qualitative ...*, p.43

kemudahan dan hambatan yang dihadapinya selama melaksanakan program. Selain itu, anggota komunitas nelayan kerang hijau sebagai penerima program yang sehari-hari melakukan aktivitas pengolahan kerang hijau juga perlu digali keterangannya tentang program, terutama manfaatnya terhadap perekonomian mereka. Delapan informan anggota pemberdayaan nelayan kerang hijau dipilih karena memenuhi kriteria khusus yaitu dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mendukung peneliti dalam memperoleh informasi.

Tabel 1.2.

Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Ketua Divisi Program DD Banten	1
2.	Pendamping Program	1
3.	Anggota komunitas Nelayan Kerang Hijau	8
Jumlah		10

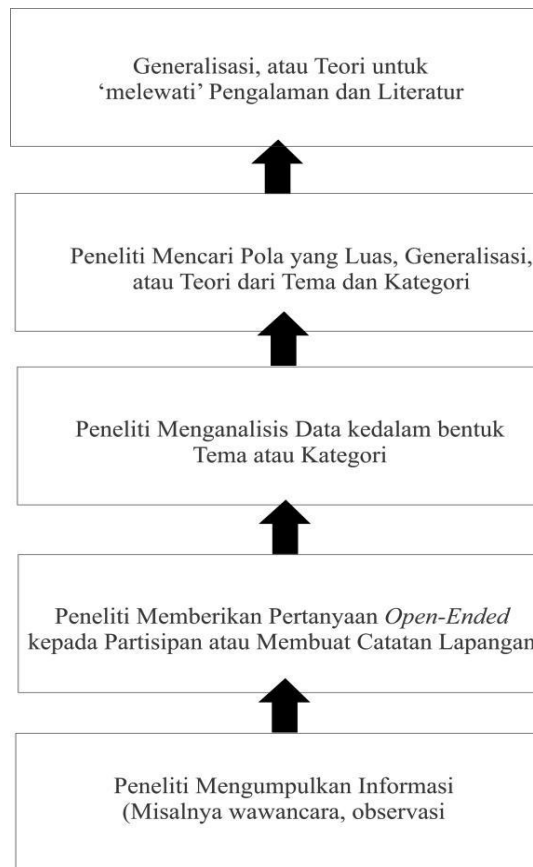
4. Teknik Analisis Data

Data kualitatif berbentuk teks, kata-kata tertulis, frase, atau simbol yang mendeskripsikan atau merepresentasikan orang, aksi, dan kejadian dalam kehidupan sosial. Peneliti kualitatif menganalisis data melalui pengorganisasian data kedalam kategori berdasarkan tema, konsep, atau kesamaan topik. Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi terjadi setelah peneliti mengumpulkan data; artinya konseptualisasi sangat ditentukan oleh data. Sedangkan operasionalisasi pada penelitian kualitatif adalah deskripsi detail tentang bagaimana peneliti mengumpulkan dan memikirkan data spesifik yang menjadi basis untuk konsep.³³

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis data induktif. Logika analisis data induktif dapat dilihat melalui skema Gambar 1.3 berikut :

³³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), p.52

Logika Analisis Induktif (Cresswell, 2003)



Menurut Cresswell (2003 ; 133), peneliti kualitatif memulai penelitian dari pengumpulan informasi detail partisipan dan membentuk informasi ini menjadi kategori atau tema. Tema atau kategori ini kemudian dikembangkan ke pola yang luas, teori, atau generalisasi yang kemudian dibandingkan dengan pengalaman pribadi atau literatur yang sudah ada.³⁴

³⁴ John W.Cresswell, *Research Design ...*, pp.88-89.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam materi penelitian secara keseluruhan, maka perlu dibuat suatu rangkaian atau sistematika antar bab sebagai suatu acuan yang utuh. Sistematika penulisan penelitian ini merupakan pengorganisasian materi penelitian yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bab. Materi per bab dalam penelitian ini disusun secara berurutan melalui sistematika berikut :

Bab Satu : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah yang berisi pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Dua : Gambaran Umum Lembaga, menguraikan tentang sejarah dan filosofi lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Banten serta program Economic Development yang digunakan dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan kerang hijau. sebagai salah satu bagian dari implementasi zakat produktif, gambaran kelurahan Margaluyu, dan nelayan kerang hijau.

Bab Tiga : menguraikan hasil temuan lapangan yang didapatkan berdasarkan wawancara, observasi mengenai kondisi masyarakat sebelum adanya program, dan implementasi program *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kerang Hijau*, dan keberlanjutan program tersebut.

Bab Empat : menguraikan model pemberdayaan yang diterapkan Dompot Dhuafa Banten dalam program pemberdayaan nelayan kerang hijau, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat serta menguraikan analisa informasi yang telah didapatkan dari temuan lapangan dengan menggunakan konsep yang terdapat pada kerangka pemikiran.

Bab Lima : Kesimpulan dan Saran, menguraikan secara singkat pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan manfaat program.